

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Dengan terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah berubah menjadi daerah otonom. Hal

tersebut diikuti dengan penyerahan sebagian kewenangan meliputi tugas dan fungsi dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga daerah membutuhkan pendanaan lebih yang berimplikasi pada kebutuhan akan transfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diarahkan sebagai pendamping bersamaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kegiatan pembangunan ekonomi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Perekonomian diharapkan tumbuh seiring dengan meningkatnya dana perimbangan sebagai komponen pengeluaran pemerintah pusat kepada daerah. Akan tetapi linearitas antara akumulasi dana (PAD dan dana grant) terhadap pertumbuhan ekonomi akan tercapai manakala daerah bertindak bijak dan seksama dalam merencanakan dan mengalokasikan dana yang ada untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi sebagai katalis munculnya dan meningkatnya aktivitas perekonomian di daerah. Hal ini dilaksanakan dengan cara meningkatkan belanja langsung serta mengurangi belanja tidak langsung yang tidak berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Ironisnya (Yudhoyono, 2011) menemukan bahwa pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan

terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru daerah setiap tahun. Sebagian Belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelajaran lain yang tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan. Tak diragukan lagi, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor ini sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih mensejahterakan masyarakat.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Istilah pertumbuhan secara umum adalah suatu ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan. Salah satu cara untuk mengukur kinerja yaitu melalui angka capaian pertumbuhan ekonomi sebagai indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan domestik bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Susanti dkk, 2000:23). Meningkatkan produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto perkapitanya (Djoyohadikusumo, 1994:1). PDRB dalam statistik disajikan dalam dua penilaian, yaitu atas harga berlaku (*at current market*) yaitu PDRB yang memasukkan faktor inflasi di dalamnya dan atas dasar harga konstan (*at constant market price*) yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi.

Menurut Sukirno (1996) dalam Abdullah dkk (2013), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Kinerja Perekonomian suatu daerah dikatakan baik ditentukan oleh salah satu indikator makroekonomi dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah atau negara dalam suatu periode tertentu. PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah, memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makroekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota
di Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2012-2017

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT KAB/KOTA (PERSEN)				RATA- RATA
		2014	2015	2016	2017	
1	Sumba Barat	5,03	5.16	4.76	4.82	4,9
2	Sumba Timur	5,08	5.07	4.99	5.04	5
3	Kupang	5,04	5.07	5.10	5.05	5,1
4	Timor Tengah Selatan	4,18	4.25	4.36	4.40	4,3
5	Timor Tengah Utara	4,42	4.40	4.58	4.70	4,5
6	Belu	5,28	6.04	5.57	5.35	5,6
7	Alor	4,84	4.24	4.80	4.89	4,7
8	Lembata	4,77	4.96	5.09	4.98	5
9	Flores Timur	4,41	4.82	4.84	4.62	4,7
10	Sikka	3,91	4.20	4.56	4.40	4,3
11	Ende	5,26	5.33	5.01	5.09	5,2
12	Ngada	6,21	5.09	4.83	4.68	5,2
13	Manggarai	5,27	5.43	5.11	5	5,2
14	Rote Ndao	4,43	4.25	4.85	5.02	4,6
15	Manggarai Barat	3,83	4.49	4.08	4.45	4,2
16	Sumba Tengah	4,17	4.39	4.22	4.80	4,4
17	Sumba Barat Daya	6,47	5.54	4.02	4.62	5,2
18	Nagekeo	4,43	4.54	4.59	4.61	4,5
19	Manggarai Timur	6	5.34	5.27	5.17	5,4
20	Sabu Raijua	6,25	5.04	5.14	5.04	5,4
21	Malaka	4,74	5.65	5.08	4.90	5,1
22	Kota Kupang	7,52	7.20	6.81	6.63	7
	Rata – Rata	5,1	5,0	4,9	4,9	5,0

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang, diolah 2019

Tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung berfluktuasi. Apabila dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonominya, rata-rata pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5%. Meskipun rata-rata

pertumbuhan ekonomi sebesar 5% bukan berarti semua kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur mampu memperoleh rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut. Terdapat beberapa daerah yang rata-rata laju pertumbuhan ekonominya berada dibawah nilai rata-rata laju pertumbuhan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten dan kota yaitu secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Artinya kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara kabupaten yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit akan memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula. Selain itu perkembangan pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota, dilihat dari pertumbuhan ekonominya mengindikasikan adanya ketimpangan antara kabupaten dan kota. Secara umum ketimpangan tersebut disebabkan oleh besarnya sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan suatu daerah bersumber dari diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Besarnya PAD yang diperoleh oleh suatu daerah juga menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan PAD Kabupaten dan Kota
di Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2014 – 2017

KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN PAD MENURUT KAB/KOTA (PERSEN)				RATA- RATA
	2014	2015	2016	2017	
Sumba Barat	0,00	14,95	36,26	45,17	24,00
Sumba Timur	27,35	-0,34	56,3	5,88	45
Kupang	20,74	5,99	38,75	12,38	19
Timor Tengah Selatan	20,51	16,29	70,39	22,92	32,53
Timor Tengah Utara	28,83	1,7	78,07	29,46	34,52
Belu	35,29	35,54	11,29	1,94	21,02
Alor	10,52	41,2	31,4	-3,8	19,83
Lembata	21,22	5,71	27,13	47,86	25
Flores Timur	36,18	4,51	46,37	6,81	23,48
Sikka	33,42	12,04	55,91	-0,33	25
Ende	61,03	29,00	44,24	-2,54	33
Ngada	51,13	8,73	28,43	9,34	24
Manggarai	27,57	22,78	37,6	16,53	26,12
Rote Ndao	-4,64	9,83	42,08	8,05	14
Manggarai Barat	15,41	6,02	78,89	25,72	31,51
Sumba Tengah	-4,69	1,93	43,44	14,29	14
Sumba Barat Daya	39,1	22,05	68,04	21,42	37,65
Nagekeo	5,01	-5,94	56,17	16,25	18
Manggarai Timur	18,64	24,57	15,97	88,02	37
Sabu Raijua	70,92	55,61	86,07	12,19	56,2
Malaka	-	-	-	113,50	28,38
Kota Kupang	38,5	22,19	39,42	28,97	32,27
Rata - Rata	24,15	15,2	45,1	23,6	27,0

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang, diolah 2019

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa secara rata-rata dari tahun 2014 sampai dengan 2017, terlihat bahwa pada tahun 2015 ke 2016 laju pertumbuhan PAD mengalami peningkatan sementara laju pertumbuhan ekonominya tidak mengalami peningkatan. Secara keseluruhan baik kabupaten maupun kota belum memperlihatkan efektifitas dalam menggunakan pendapatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2010). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Bastian, 2012).

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap daerah baik kabupaten maupun kota memiliki sumber pendapatan lain yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk

memenuhi kebutuhan celah fiskal antar daerah. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada dua komponen dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lain seperti dana alokasi khusus maupun dana kontijensi (penyeimbangan). Untuk itu diharapkan DAU dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi dapat dimaknai bahwa semakin besar proporsi DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh suatu daerah. Untuk melihat kontribusi DAU terhadap

pertumbuhan ekonomi di kabupaten / kota di Nusa Tenggara Timur, maka dapat dilihat dari tabel perbandingan dibawah ini:

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan DAU Kabupaten dan Kota
di Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2014 – 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN DAU MENURUT KAB/KOTA (PERSEN)				RATA- RATA
		2014	2015	2016	2017	
1	Sumba Barat	16,81	10,39	14,12	6,31	11,91
2	Sumba Timur	19,90	11,46	8,78	5,35	11,37
3	Kupang	16,66	12,45	11,87	4	11,25
4	Timor Tengeh Selatan	18,5	11,49	8,55	6,19	11,18
5	Timor Tengah Utara	20,66	13,87	9,35	4,24	12,03
6	Belu	20,28	12,48	-39,83	32,55	6,37
7	Alor	14,92	11,38	8,36	6,85	10,38
8	Lembata	19,19	12,15	10,29	5,67	11,83
9	Flores Timur	12,85	13,71	9,61	7,05	10,81
10	Sikka	21,5	13,2	11,01	4,03	12,44
11	Ende	22,1	10,22	7,92	6,18	11,61
12	Ngada	17,33	3,96	17,25	5,77	11,08
13	Manggarai	27,74	11,1	12,07	5,32	14,06
14	Rote Ndao	20,36	21,33	4,74	6,23	13,17
15	Manggarai Barat	19,38	11,61	15,28	6,57	13,21
16	Sumba Tengah	15,36	123,07	-43,53	4,66	24,89
17	Sumba Barat Daya	15,86	12,89	13,9	6,75	12,35
18	Nagekeo	20,98	10,1	14,03	2,85	11,99
19	Manggarai Timur	15,78	12,47	10,31	6,43	11,25
20	Sabu Raijua	12,44	22,88	16,12	5,46	14,23
21	Malaka	-	-	-	45	11,17
22	Kota Kupang	20,17	16,26	-4,8	5,43	9,27
	Rata - Rata	17,67	17,2	5,3	8,6	12,17

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang,
diolah 2019

Tabel 3 di atas dilihat bahwa, rata-rata laju pertumbuhan DAU Kabupaten dan Kota dari tahun 2014 sampai dengan 2017 yaitu sebesar 12,17% dan pertumbuhan ekonominya sebesar 5%. Dari hasil perbandingan

terdapat permasalahan dimana kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan DAU yang lebih rendah justru memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seharusnya semakin besar daerah yang memiliki pertumbuhan DAU yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh juga akan tinggi pula. Adanya permasalahan ini, manandai bahwa harapan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah belum memberikan hasil yang diharapkan.

Fenomena ini terjadi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang seutuhnya kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana tersebut sehingga pemerintah daerah secara leluasa menggunakannya pada pembiayaan yang dianggap tidak sejalan dengan pertumbuhan.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah pusat juga memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan khusus suatu daerah. Kegiatan khusus suatu daerah yang dimaksud yaitu untuk membiayai sarana prasarana pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya. Tabel 4 berikut ini merupakan perkembangan DAK kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur.

Tabel .14
Laju Pertumbuhan DAK Kabupaten dan Kota
di Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2014 – 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN DAK MENURUT KAB/KOTA (PERSEN)				RATA- RATA
		2014	2015	2016	2017	
1	Sumba Barat	-14,48	54,76	-20,43	72,92	23,19
2	Sumba Timur	32,61	7,58	3,91	48,87	23,24
3	Kupang	17,66	1,4	-14,86	181,82	46,51
4	Timor Tengah Selatan	-23,05	65,22	-22,86	45,54	16,21
5	Timor Tengah Utara	14,49	20,7	8,13	37,69	20,25
6	Belu	70,45	-1,27	-9,94	35,65	23,72
7	Alor	31,68	29,85	14,7	34,54	27,69
8	Lembata	9,82	4,54	21,73	53,09	22,30
9	Flores Timur	15,62	14,42	13,7	45,72	22,37
10	Sikka	1,35	-0,5	45,61	49	23,53
11	Ende	31,01	-20,32	-16,48	67,87	15,52
12	Ngada	13,25	28,57	4,19	53,24	24,81
13	Manggarai	-12,19	70,03	19,81	31,17	27,21
14	Rote Ndao	6,08	129,85	0,46	40,83	44,31
15	Manggarai Barat	-1,62	27,21	53,74	19,49	24,7
16	Sumba Tengah	-19,33	12,04	25,85	41,55	15,0
17	Sumba Barat Daya	2,01	27,66	-24,62	154	39,8
18	Nagekeo	16,25	-36,1	85,52	67,52	33,3
19	Manggarai Timur	56,18	-13,98	-8,19	33,65	16,9
20	Sabu Raijua	-2,45	16,04	13	29,96	14,1
21	Malaka	-	-	-	-	-
22	Kota Kupang	-23,26	80,75	26,03	1,56	21,3
	Rata – Rata	10,03	23,6	10,0	52,1	23,9

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang, diolah 2019

Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa dari 2014 sampai dengan 2017 rata-rata laju pertumbuhan DAK kabupaten dan kota yaitu sebesar 23,9%. Apabila dicermati perkembangan laju pertumbuhan DAK dari tahun 2014 sampai dengan 2017, terlihat laju pertumbuhan DAK cenderung berfluktuasi dan tidak stabil. Hal ini ditandai dengan sebagian kabupaten dan kota memperoleh pertumbuhan DAK yang tinggi sedangkan sebagian

kabupaten memperoleh pertumbuhan yang rendah. Faktor yang menyebabkan ketimpangan pertumbuhan DAK antar daerah yaitu karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-besa pula. Daerah yang membutuhkan pembangunan yang cukup tinggi akan memperoleh DAK yang tinggi pula, dan begitu juga sebaliknya.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian.

Menurut penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal ini didasarkan pada

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Alokasi belanja ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Rendahnya kapasitas fiskal suatu daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Setiap daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan memaksimalkan belanja modal daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Dalam rangka mengoptimalkan tingkat pelayanan publik, pemerintah daerah setempat melakukan pergeseran komposisi belanja. Pergeseran ini ditunjukkan untuk peningkatan potensi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktifitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan

pentingnya meningkatkan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik.

Peneliti terdahulu, diantaranya oleh Afrisa Ayu, et.al (2012), memperoleh menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pipin Prasetyo (2011), menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan Atsushi Limi (2004), memperoleh hasil bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan latar belakang uraian, fenomena dan data diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1 Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT?
- 2 Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wahana untuk memahami teori tentang pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal di Kabupaten / Kota Provinsi NTT. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji variabel yang sama dengan ruang lingkup yang berbeda pada waktu yang akan datang.